

INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DAN MONETER INTERNASIONAL PERAN STRATEGIS BANK SENTRAL

Indah Kurnia Fita Sari, Ismah Thayyibah Hanun, Ikmalur Rizal

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Univesitas Trunojoyo

Email: 220721100163@student.trunojoyo.ac.id, 22072110015@student.trunojoyo.ac.id,
220721100019@student.tunojoyo.ac.id

Abstrak

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter di setiap pemerintahan berbeda beda dengan melihat kondisi dan realita perkembangan perekonomian masing masing. Menyikapi hal tersebut salah satu kebijakan moneter yang di ambil pada pemerintahan zaman Nabi adalah dengan menggunakan standar emas dan perak karena tingkat stabilitas nilai tukarnya. Namun hal ini tidak serta merta berlaku pada kebijakan moneter di negara mayoritas muslim pada era modern termasuk di Indonesia karena faktor langkanya bahan baku uang emas maupun perak. Sebagai penggantinya di terbitkan uang fiducier yang bahan bakunya bukan dari emas perak dan untuk menjagakestabilan nilainya dengan di bantu pemberlakuan suku bunga yang justeru dilarang di dalam Islam. Salah satu dari beberapa argumen pelarangan sistem bunga ini adalah fakta bahwa suku bunga tinggi dapat mempengaruhi tingkat permintaan uang, sedangkan permintaan uang ini tidak di gunakan untuk kegiatan yang mendesak seperti konsumsi atau kegiatan produktif tetapi lebih di gunakan untuk kegiatan spekulatif.

Kata Kunci : *Ekonomi Syariah, Moneter Internasional, Bank Sentral*

Abstrack

In its capacity as a central bank, Bank Indonesia has one single goal, namely achieving and maintaining stability in the value of the rupiah. Monetary policy in every Different governments look at the conditions and realities of development respective economies. Addressing this is one of the policies monetary policy taken during the reign of the Prophet was by using gold and silver standards because of the stability of the exchange rate. However, this does not necessarily apply to monetary policy in the country The majority of Muslims in the modern era, including in Indonesia, are due to factors scarcity of raw materials for gold and silver money. As are placement in issue fiduciary money whose raw material is not gold, silver and for maintain the stability of its value with the help of the application of low interest rates in fact, it is prohibited in Islam. One of several arguments for prohibition This interest system is a fact that high interest rates can affect the level of demand for money, while this demand for money is not used for urgent activities such as consumption or productive activities but more used for speculative activities.

Keyword : *sharia economics, International Monetary, central Banking.*

PENDAHULUAN

Berbeda dengan perspektif kapitalis, sosialis, atau kombinasi keduanya, Islam memiliki pandangan unik tentang masalah ekonomi. Hak kepemilikan individu dilindungi dalam Islam sementara kepentingan masyarakat dilindungi dengan menjaga moralitas dan keseimbangan antara kepentingan individu dan publik.

Kapitalis dan sosialis menentang sistem ekonomi Islam karena Islam hanya dianggap sebagai kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga tidak dapat diterima sebagai perspektif ekonomi. Mereka juga percaya bahwa hubungan antara agama dan ekonomi harus dihindari karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mereka percaya bahwa Islam memiliki terlalu banyak aturan, sehingga tidak masuk akal untuk menggabungkan ekonomi dengan Islam.

Kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis berpendapat bahwa Islam adalah sebuah sistem kepercayaan yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerima Islam sebagai perspektif ekonomi karena mereka menganggap Islam sebagai sistem kepercayaan yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak mengizinkan hubungan antara ekonomi dan urusan agama dicampur. Salah satu alasan mereka mengatakan bahwa ekonomi dan Islam tidak boleh disatukan adalah karena hal ini¹.

Pandangan kapitalis dan sosialis tentang ekonomi tidak sesuai dengan Islam, oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur ekonomi agar menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dengan prinsip-prinsipnya.

Namun, sistem moneter internasional mengatur urusan keuangan internasional berdasarkan penetapan nilai tukar atau jenis aset cadangan internasional. Sistem moneter internasional yang baik memiliki aturan yang dapat meningkatkan investasi, perdagangan, dan ketergantungan internasional, dan juga harus memastikan bahwa keuntungan perdagangan didistribusikan secara adil di antara semua pihak atau negara yang terlibat dalam perdagangan.

Sementara itu, sistem moneter adalah sistem yang mengatur urusan keuangan yang bisa dikelompokkan berdasarkan cara penetapan nilai tukar atau jenis aset cadangan internasional. Dalam sistem moneter internasional yang baik, terdapat aturan yang dapat meningkatkan perdagangan global, investasi internasional, serta ketergantungan global. Selain itu, sistem tersebut juga harus menciptakan distribusi keuntungan perdagangan yang adil di antara semua pihak atau negara yang terlibat. Kualitas sistem moneter internasional dapat dinilai berdasarkan tiga kriteria utama yaitu:

Pertama, kriteria penyesuaian (*adjustment*), merujuk pada fasilitas, prosedur, proses atau kemudahan mekanisme koreksi atas setiap ketidakseimbangan neraca pembayaran yang terkandung dalam masing-masing sistem. Sebuah sistem moneter internasional yang baik juga harus mampu menciptakan meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk penyesuaian tersebut.

Kedua, kriteria likuiditas (*liquidity*) mengacu pada sejumlah aset cadangan internasional yang tersedia guna mengatasi berbagai ketidakseimbangan temporer pada neraca pembayaran. Berdasarkan pada kriteria seperti ini, sebuah sistem moneter internasional yang baik adalah suatu sistem yang mampu memanfaatkan secara leluasa dalam rangka mengoreksi defisit atau surplus neraca pembayaran tanpa mengganggu

¹ Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. 2007 Jakarta: Kencana. hal. 2

beroperasinya perekonomian domestik yang dapat menimbulkan tekanantekanan inflasioner terhadap negara-negara lain secara keseluruhan.

Ketiga, kriteria kepercayaan (*confidence*). Kriteria ini merujuk pada sejauh mana masyarakat internasional memiliki pengetahuan dan menaruh kepercayaan atas mekanisme penyesuaian dan ketersediaan cadangan internasional dalam mengatasi berbagai masalah pembayaran internasional, yang ada pada sebuah sistem. Atas dasar kriteria ini, sebuah sistem moneter internasional dikatakan baik apabila masyarakat dunia memberikan kepercayaan yang memadai terhadapnya².

Bank, sebagai lembaga keuangan yang membantu masyarakat, harus diawasi dan dipertahankan agar tetap beroperasi dengan baik. Karena terkait dengan stabilitas moneter dan nilai rupiah, fungsi bank sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur urusan bank. Sebagai badan usaha, bank, menurut Pasal 1, Ayat 2, mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai simpanan dan menyalurkannya kembali. Krisis keuangan memiliki efek buruk yang membuat negara berusaha keras untuk mencegahnya. Bank sentral memiliki tanggung jawab untuk memastikan stabilitas moneter atau nilai uang. Sebagai lembaga keuangan, bank akan selal.

Bank sebagai lembaga keuangan akan selalu bersaing dengan bank lain untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan, olehkarena itu pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia perbankan melalui berbagai paket kebijakan yang berupa paket deregulasi khususnya yang berkenan dengan sector perbankan³.

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, mengatur bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak⁴.

KAJIAN LITERATUR

Ekonomi, menurut definisi, mencakup pemeriksaan metode untuk secara efisien menghasilkan, mengedarkan, mengalokasikan, dan memanfaatkan komoditas dan layanan dalam komunitas untuk secara efektif memenuhi kebutuhan material. Dalam konteks sosial, operasi ekonomi mencakup pengelolaan berbagai aspek kemakmuran, seperti kepemilikan, ekspansi, dan peruntukan.

Pengertian Ekonomi

² Bogdanowitz-Bindert, Christine A. *Solving Global Debt Crisis*, (Ballinger Publishing Co, 1989)

³ Sudian, Yenfi, Marheni. November 2017. *Analisis Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Dan Minat Masalah Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan. Volume 10. Nomor 2

⁴ Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.

Istilah “Ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, khususnya dari “oicos” dan “nomos” yang diterjemahkan menjadi rumah dan pemerintahan. Ekonomi berkaitan dengan peraturan yang mengatur pengelolaan kebutuhan manusia dalam rumah tangga, yang mencakup rumah tangga individu (*volkshuishouding*) dan rumah tangga pemerintah (*staatshuishouding*).

Dalam terminologi alternatif, alasan ekonomi hanya berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan mata pencaharian rumah tangga, dan dalam perkembangannya, istilah rumah tangga tidak hanya mencakup unit rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan keturunan, tetapi juga rumah tangga yang lebih luas, khususnya rumah tangga kolektif negara, wilayah, dan komunitas global.

Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga, dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada suatu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia⁵.

Ekonomi, dalam arti luas, mencakup upaya kolektif dan keterampilan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan mencapai keadaan kemakmuran. Pemenuhan kebutuhan setiap orang dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya tertentu. Sumber daya ini dapat mengalami transformasi menjadi komoditas bernilai tinggi yang kemudian disebarluaskan untuk pemanfaatan komunal⁶.

Ekonomi konon adalah disiplin yang menggambarkan metodologi produksi, alokasi, pembagian, dan pemanfaatan komoditas dan jasa dalam kerangka sosial untuk mengoptimalkan pemenuhan persyaratan material masyarakat. Upaya ekonomi dalam masyarakat ditujukan untuk mengatur hal-hal terkait kekayaan yang meliputi kepemilikan, kemajuan, dan dispensasi⁷.

Publikasi ini menggali keterlibatan bank sentral dalam penggabungan keuangan Islam dan struktur moneter global. Studi ini menawarkan perspektif tentang cara-cara bank sentral dapat membantu dalam mempromosikan konvergensi ekonomi yang sesuai syariah dengan kerangka moneter di seluruh dunia⁸.

Jurnal ini juga membahas peran bank sentral dalam mempromosikan perbankan dan keuangan Islam, dengan fokus pada Arab Saudi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana bank sentral dapat berperan dalam mengintegrasikan ekonomi syariah dengan sistem moneter internasional⁹.

⁵ Putong, Iskandar. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. 2010. Jakarta: Mitra Wacana Media. hal. 1

⁶ Chapra, M Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. 2001 Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute. hal. 261.

⁷ . Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. 2007. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 3

⁸ Al-Qudsy, R. . "The Role of Central Banks in the Integration of Islamic Finance and International Monetary System. 2019" *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 1-24.

⁹ Alqahtani, F. "The Role of Central Banks in Promoting Islamic Banking and Finance: The Case of Saudi Arabia." 2010 *Journal of Islamic Banking and Finance*, 37(4), 87-100.

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah melalui studi literatur, dimana penulis mencari referensi teori yang relevan dengan studi kasus atau permasalahan yang ada. Teori yang didapatkan dari studi literatur ini dijadikan sebagai fondasi dasar dalam mengembangkan kajian dan menemukan solusi atau jalan keluar. Studi literatur merupakan cara yang digunakan dalam mengumpulkan data atau sumber yang berhubungan dengan topik permasalahan atau kajian, yang diangkat dalam suatu penelitian. Sumber dari studi literatur dapat ditemukan dari buku, jurnal, dokumentasi, internet dan pustaka.

Pembahasan

Peran penting uang dalam kebijakan moneter

Dimulai sejak awal, di mana ia berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan barang dan mengurangi perbedaan nilainya. Fungsi uang sebagai media pertukaran yang mudah dan efisien juga menjadikannya sebagai ukuran nilai barang yang paling tepat. Pemanfaatan uang ini menandakan kemajuan dalam masyarakat manusia, yang bertujuan untuk memerangi praktik riba lama dan merampingkan transaksi dengan cara yang sederhana. Dalam keuangan kontemporer, Bank Sentral secara eksklusif mengeluarkan uang sebagai satu-satunya entitas yang berwenang untuk membuat bentuk pembayaran yang sah

Menurut Pasal 13 dan 26 (1) Undang-Undang Bank Sentral Tahun 1968, Bank Indonesia adalah pihak yang berhak mengeluarkan uang kertas dan uang logam di Indonesia¹⁰. Otoritas tunggal ini berfungsi untuk menghilangkan double issuer serta potensi penerbitan uang palsu yang mengganggu roda transaksi¹¹. (Terdapat beberapa jenis nilai uang dengan mempertimbangkan berbagai unsur dan aspek yang berpengaruh kepada permintaan uang itu sendiri di antaranya adalah sebagai berikut¹² :

1) Nilai intrinsik uang

Nilai inheren mata uang terletak pada nilai inheren yang tertanam dalam entitas yang mampu eksistensi independen. Semua elemen yang ada pada mata uang, mulai dari nilai nominalnya hingga bahan yang digunakan dalam produksinya, memiliki arti penting. Bentuk mata uang ini dapat berupa logam atau kertas, seperti sepuluh ribu koin dengan nilai nominal Rp 10.000.

2) Nilai ekstrinsik uang

Nilai ekstrinsik uang, berbeda dengan nilai intrinsiknya, ditentukan oleh hubungannya dengan objek atau entitas lain. Ketika mata uang memiliki

¹⁰ Fathur Rohim, Mekanisme transmisi Kebijakan Moneter Melalui Suku Bunga SBI sebagai sasaran Operasional Kebijakan moneter dan Variabel Makro Ekonomi Indonesia (Medan: USU Press, 2011), h. 81-84

¹¹ 2A Sutawijaya, Pengaruh faktor faktor Ekonomi terhadap Inflasi Di Indonesia, Jurnal Organisasi dan Manajemen, 80-89.

¹² Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro (Jakarta: LPFE UI Depok, 2008), h. 110.

nilai Rp10,00, memungkinkan pembelian 2 mangkuk bakso, ini menandakan nilai ekstrinsik Rp. 10.000. Pentingnya nilai uang terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan harga, berfungsi sebagai media pertukaran untuk transaksi, memfasilitasi perdagangan, dan mewakili kekayaan nyata.

Dalam masyarakat kontemporer, sebagian besar transaksi keuangan, transaksi komersial, dan berbagai operasi bergantung pada mata uang sebagai media transaksi dan pertukaran karena pertimbangannya terhadap efektivitas dan nilai uang yang dijamin oleh entitas pemerintah dan diakui oleh badan pemerintah lainnya. Bank sentral diberikan yurisdiksi untuk mengatur volume uang yang beredar, pelepasan unit moneter, mata uang fundamental, dan tingkat bunga dengan tujuan mencapai tujuan ekonomi makro.

Kebijakan moneter Bank Sentral

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral adalah ukuran strategis yang digunakan oleh badan pengatur keuangan, biasanya bank sentral, yang bertujuan mengendalikan berbagai indikator keuangan termasuk jumlah uang beredar, uang dasar, kredit, dan suku bunga. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai target ekonomi tertentu yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan analisis menyeluruh dan wawasan yang berasal dari aspek-aspek seperti inflasi, ekspansi ekonomi, investasi modal, perdagangan global, dan faktor-faktor relevan lainnya¹³.

Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter, yang mengalami beberapa revisi melalui Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU Perbankan Indonesia), dan Pasal 7, berhasil tercapai. Stabilisasi rupiah meliputi dua dimensi, khususnya stabilitas rupiah mengenai barang dan jasa sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat inflasi, dan stabilitas rupiah dalam kaitannya dengan mata uang asing, yang ditunjukkan oleh evolusi nilai tukar. Perbandingan¹⁴.

Fluktuasi suku bunga memberikan pengaruh besar pada permintaan barang dan jasa, serta investasi, sehingga berpotensi memicu fluktuasi signifikan dalam aktivitas ekonomi¹⁵. Stabilitas ekonomi menunjukkan keadaan di mana ekonomi berfungsi dengan cara yang diantisipasi, dengan tingkat regulasi dan daya tahan¹⁶. Dalam kasus ketidakstabilan tingkat harga, yang muncul ketika jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan volume barang, kebijakan moneter dapat diterapkan¹⁷. Fluktuasi harga yang tidak normal memiliki kapasitas untuk mempengaruhi operasi ekonomi suatu komunitas.

¹³ Saiful Maqrobi dan Amin P, Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Uji Kausalitas Inflation and Economic Growth: *Testing for Causality*, Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan, vol 3 no 1 Mei 2011

¹⁴ Frederick Mishkin, *Ekonomi Uang Perbankan and Financial Market* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.89

¹⁵ Barro RJ, *Harapan Rasional dan Peran Kebijakan moneter*, Jurnal Ekonomi Moneter, 2(5), 2016, h.1-33

¹⁶ Ferry Irawan dan Sugiharso Saufan, *Kebijakan moneter pertumbuhan ekonomi dan pengujian Hipotesis Ekspektasi Rasional dengan analisis VAR*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.6 no 1 tahun 2005, h.28-31

¹⁷ Perry Warjiyo dan Juda Agung, *Mekanisme Transmisi Kebijakan moneter di Indonesia. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Buletin Ekonomi dan Moneter dan Perbankan*, Juni 2008, h.97-98

Dalam skenario alternatif, penajajaran pasokan moneter dan volume komoditas dan jasa dapat mempengaruhi kecenderungan investor untuk mengalokasikan modal di sektor berwujud. Usaha keuangan ini memfasilitasi generasi peluang kerja, akibatnya mengarah pada proliferasi peluang kerja.

Instrumen Kebijakan Moneter Bank Sentral

Instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral untuk tujuan menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter biasanya meliputi:

a) Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka digunakan dengan tujuan mengatur aliran dana untuk mengatasi tantangan ekonomi seperti inflasi dan resesi, sementara juga memastikan stabilitas ekonomi, stabilitas harga, peluang kerja, dan perbaikan dalam neraca pembayaran¹⁸. Selain itu, tujuan lain dari operasi pasar terbuka mencakup pelestarian stabilitas ekonomi, stabilitas harga, peningkatan peluang kerja, dan kemajuan dalam neraca pembayaran¹⁹. Pendekatan ini mempengaruhi tingkat dan komposisi jumlah uang beredar, yang secara rumit terkait dengan stabilitas harga. Dalam ranah perumusan kebijakan moneter, ada target operasional yang berupaya mempromosikan stabilitas ekonomi di cakrawala pendek, menengah, dan jangka panjang. Selain itu, target ini dapat memengaruhi hasil dan alat yang digunakan dalam kebijakan moneter. Target operasional tersebut dapat berkisar pada tujuan pasokan uang primer atau suku bunga pasar jangka pendek, yang dilaksanakan melalui kegiatan seperti penerbitan sekuritas pemerintah, operasi valuta asing, dan perdagangan sekuritas²⁰. Akibatnya, intervensi ini telah memainkan peran dalam mendorong pemulihan ekonomi dan memperkuat cadangan devisa negara melalui investasi dalam sekuritas pemerintah.

b) Giro Wajib Minimum (GWM)

Cadangan hukum, yang dikenal sebagai Minimum Mandatory Current Account (GWM), tunduk pada pengawasan peraturan oleh bank sentral. Lembaga keuangan diamanatkan untuk mempertahankan tingkat cadangan tertentu, yang merupakan proporsi dari kewajiban lancar mereka. Rasio yang lebih rendah menandakan kapasitas yang lebih kuat bagi bank untuk memanfaatkan cadangan likuiditas mereka untuk memperpanjang kredit.

c) Fasilitas Diskonto

Jika bank sentral bertujuan untuk menambah dukungannya di dalam masyarakat, ia dapat memilih untuk mengurangi suku bunga diskonto dan

¹⁸ Faisal Affandi, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar BI Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010-2015*, Jurnal Attawasuth, vol 1 no 1 tahun 2016, h.45-72

¹⁹ Nurul Jannah, *Pengaruh Operasi Moneter terhadap Inflasi Indonesia*, Attawasuth Jurnal Ekonomi Islam, vol 5 no 1 tahun 2020.

²⁰ Haryono dkk, *Mekanisme pengendalian Moneter dengan inflasi sebagai Sasaran Tunggal*, Buletin

suku bunga yang berkaitan dengan pinjaman yang diberikan kepada bank umum, di samping mengurangi biaya dan jumlah bunga yang ditanggung oleh bank publik tersebut.

d) **Himbauan Moral**

Bank sentral memiliki kemampuan untuk mengeluarkan permohonan moral kepada lembaga perbankan, biasanya disampaikan oleh kepala bank sentral, atau menyediakan data makroekonomi tambahan melalui pernyataan resmi. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan bank publik dengan informasi penting untuk membantu dalam pengelolaan aset dan kewajiban mereka.

Instrumen kebijakan moneter Islam

Alat kebijakan moneter Islam digunakan untuk regulasi kuantitatif pinjaman dan pengenaan pembatasan kredit. Ini mensyaratkan bahwa bank komersial diberi ambang kredit maksimum untuk transaksi keuangan dengan pelanggan. Pemerintah menggunakan rekening giro sebesar 4.444 untuk memanipulasi cadangan bank komersial, mirip dengan mekanisme operasional bank sentral di pasar terbuka yang secara langsung berdampak pada bank komersial. Selain itu, pembentukan dana bersama digunakan sebagai strategi untuk memastikan bahwa bank komersial memiliki simpanan yang cukup untuk mengatasi tantangan likuiditas. Melalui keterlibatan langsung, konsultasi, dan interaksi dengan bank publik, bank sentral mampu mengawasi kekuatan dan hambatan yang dihadapi oleh bank publik, sehingga memberikan panduan yang sesuai untuk mengatasi masalah perbankan yang muncul dan memfasilitasi realisasi tujuan perbankan yang telah ditentukan.

Pemerintah juga dapat menjamin alokasi kredit sektor produktif dengan memastikan bahwa alokasi kredit perbankan didasarkan pada tujuan pemanfaatan optimum bagi pelaku usaha yang dapat berupa barang atau jasa yang dapat didistribusikan kepada masyarakat luas. Meskipun dana perbankan biasanya dikumpulkan dari masyarakat kecil, penyaluran kredit kepada mereka justru sering tidak sebanding.

KESIMPULAN

Kesimpulan jurnal menyatakan bahwa harmonisasi syariah global dan sistem keuangan memerlukan kontribusi penting dari bank sentral untuk mendorong kemajuan ekonomi yang bertahan lama dan teguh dalam kerangka syariah. Pentingnya pelaksanaan kebijakan moneter terletak pada korelasinya dengan konsep bahwa sirkulasi mata uang secara rumit terkait dengan sektor komoditas dan jasa atau sektor komersial. Dengan mengatur volume mata uang yang beredar dalam masyarakat, seseorang dapat memberikan dampak pada faktor-faktor ekonomi nyata seperti tingkat harga, investasi, dan output. Pemanfaatan mata uang emas dan perak muncul sebagai alternatif yang layak dalam strategi moneter Islam karena karakteristiknya yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, J., Tjahjono, E. D., Juhro, S. M., Sahminan, Hutabarat, A. R., Wimanda, R. E., & Handayani, D. E. (2015). *Desain Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia Pasca Krisis*. 1–125. <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/ITF/Documents/Disain-Kerangka-Kerja-Kebijakan-Moneter-di-Indonesia-Pasca-Krisis-Flexible-Inflation-Targeting-Framework.pdf>.
- Anis, F. H., Kunci, K., & Berjangka, D. (2021). *Sudian, Yenfi, Marheni. 2017. Analisis*. IX(7), 73–85.
- Diyah Ayu Wulansari, & A.Saiful Aziz. (2019). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Bi Rate Danfinancing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018. *Malia (Terakreditasi)*, 11(1), 51–64. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i1.1727>.
- Dr. FAISAL, S.Ag., S.H., M. H. (2015). Modul Hukum Ekonomi Islam. In *Unimal Press*.
- Huda, M. (n.d.). Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam. In *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmiah Keagamaan Islam* (Vol. 3, Nomor 1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.
- Jannah, N. (2020). Pengaruh Operasi Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (Vol. 5, Nomor 1, hal. 142). <https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7900>.
- Jumiati, E., & Al-Muhajirin Purwakarta, S. (2022). Kebijakan Moneter Sebagai Pengendali Inflasi Dan Nilai Tukar (Peran Bank Sentral). *Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 1–14.
- Rusiadi; ade novalina. (2017). *Kemampuan bi 7-day repo rate (bi7drr) dalam menjaga stabilitas ekonomi indonesia (pendekatan transmisi moneter jangka panjang)*. 10, 1979–5408. Kemampuan bi 7-day repo rate (bi7drr) dalam menjaga stabilitas ekonomi indonesia (pendekatan transmisi moneter jangka panjang).
- Sayangbati, K. C., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (n.d.). *Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia 1*.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 1.